

Perumusan Kriteria Prioritas Penilaian *Livability* Desa Nglanggeran Sebagai Desa Wisata

Aisha Maharani Puspita dan Ema Umilia

Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: ema_umilia@urplan.its.ac.id

Abstrak—Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2018, Indonesia memiliki jumlah desa wisata sebanyak 1.734 dari total 83.931 desa. Desa wisata merupakan tren pengembangan alternatif desa pada satu dasawarsa terakhir karena memiliki daya pikat yang baik. Salah satu desa wisata yang saat ini berkembang pesat yaitu Desa Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul. Desa Nglanggeran memiliki objek wisata berupa Gunung Api Purba Nglanggeran yang merupakan salah satu situs Geopark Gunung Sewu dan ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark. Desa Nglanggeran dulunya merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Berubahnya identitas desa menjadi desa wisata membuat desa banyak dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) juga membuka peluang kerja di bidang pariwisata. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terutama pada lingkungan dan sosial masyarakat. Permasalahan yang muncul akibat intervensi dari kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran membuktikan bahwa terjadi penurunan kelayakhunian desa. Oleh karena itu, penelitian ini ingin merumuskan kriteria prioritas penilaian *livability* Desa Nglanggeran sebagai desa wisata. Penelitian ini menggunakan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode primer berupa wawancara dengan stakeholder dan metode sekunder berupa survei instansi dan studi literatur. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 7 kriteria dan 24 sub kriteria penilaian *livability* prioritas Desa Nglanggeran dengan bobot kriteria tertinggi yaitu keberadaan utilitas dan bobot sub kriteria tertinggi yaitu kelayakhunian lingkungan.

Kata Kunci—Kriteria Prioritas, Bobot, *Livability*, Desa Wisata.

I. PENDAHULUAN

PARIWISATA pedesaan telah menjadi salah satu tren pengembangan model pariwisata di Indonesia pada satu dasawarsa terakhir. Dengan total luas 1,92 juta km² dan 16.056 pulau, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan didukung bentang alam yang mempesona dan keragaman budaya serta tradisi. Indonesia sendiri memiliki jumlah desa wisata sebanyak 1.734 ribu dari total 83.931 desa di Indonesia [1]. Pulau Jawa dan Bali menempati posisi paling tinggi dengan jumlah desa wisata sebanyak 857 desa wisata [2]. 270 desa wisata diantaranya berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya hanya terdapat 85 desa wisata pada tahun 2016 dan terjadi penambahan sejumlah 185 desa wisata di tahun 2019. Hal tersebut menandakan bahwa pengembangan desa wisata di Provinsi Istimewa Yogyakarta sangat pesat. Desa wisata sebagai destinasi pariwisata telah menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara karena memberikan nuansa alami dan menampilkan seni budaya lokal. Salah satu desa wisata yang menjadi daya tarik

wisatawan domestik dan mancanegara yaitu Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul.

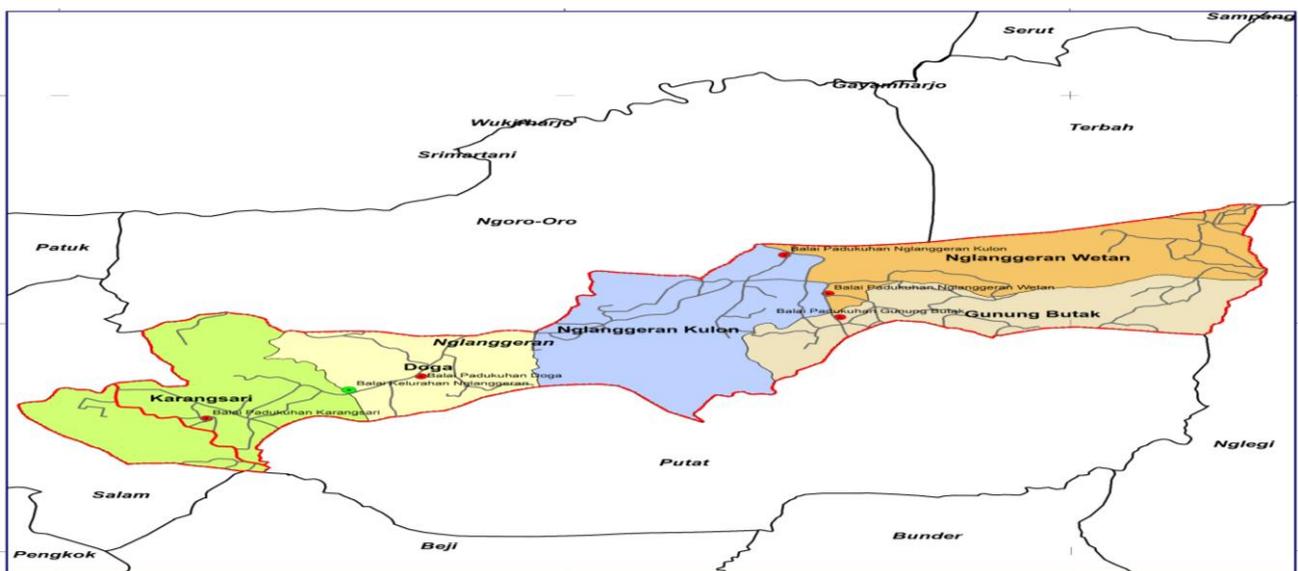
Nglanggeran merupakan Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) [3]. Desa Nglanggeran memiliki 3 daya tarik objek wisata utama yang salah satunya merupakan ikon dari Desa wisata Nglanggeran yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran. Gunung Api Purba Nglanggeran merupakan salah satu dari 13 situs “Geopark Gunung Sewu” yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Komite Geopark Indonesia pada tahun 2013 dan ditetapkan menjadi *Global Geopark* yang didukung oleh UNESCO pada tahun 2015. Perlu diketahui bahwa sebelum tahun 2008, Desa Nglanggeran merupakan salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Kondisi Nglanggeran cenderung tandus, tertinggal, dan sebagian warga hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, berkembangnya desa menjadi desa wisata menyebabkan peningkatan ekonomi masyarakat juga pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Antonius Hary Sukmono selaku sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul, bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sebesar 26,9 miliar atau menyumbang 11,7% terhadap keseluruhan PAD Gunung Kidul. Tahun 2014, Desa Nglanggeran mendapat omset pengelolaan sebesar 1,4 miliar dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,9 miliar [4]. Selain dampak ekonomi yang diberikan juga berdampak pada peningkatan kesempatan kerja yang tinggi pada bidang pariwisata. Tidak hanya itu, sektor pertanian pun ikut berkembang yang mana sekarang masyarakat Desa Nglanggeran juga menanam buah durian dan kelengkeng karena adanya perairan buatan yaitu Embung Nglanggeran [5]. Perkembangan pariwisata ini juga mengembalikan kebudayaan lokal yang sempat hilang [6] dan juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana desa demi meningkatkan penunjang desa sebagai desa wisata. Kebutuhan pokok dan komoditas pendukung pariwisata pun masih dapat tercukupi dari produk usaha dan pertanian lokal, sehingga pariwisata tidak memberatkan perekonomian masyarakat lokal selaku tuan rumah pariwisata [6].

Perkembangan Desa Nglanggeran menjadi desa wisata juga telah mendapatkan 4 penghargaan baik internasional maupun nasional dalam kurun waktu 2017-2020 yaitu *ASEAN Community Based Tourism (CBT)* pada tahun 2017 sebagai Desa Wisata Terbaik I Indonesia, *ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award)* pada tahun 2017 sebagai pariwisata berkelanjutan, *ASEAN Sustainable Tourism Award (ASTA)* pada tahun 2018 dan meraih penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif Covid-19 tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada tahun 2020.

Potensi dan daya tarik yang dimiliki Desa Wisata

Tabel 1.
Kriteria dan sub-kriteria penelitian

Kriteria	Sub-Kriteria
Keamanan lingkungan	Kriminalitas
	Penjaga keamanan
	Perkumpulan/kegiatan warga
	Kepedulian antar warga
Komunitas	Kohesi sosial
	Kerukunan sosial antar warga
	Kenyamanan menjadi bagian dari komunitas
	Saling mengenal antar anggota komunitas
Kenyamanan	Peningkatan jejaring sosial warga
	Memiliki air/udara/tanah dalam keadaan aman
	Kebisingan/polusi suara
	Kelayakhunian lingkungan
Ekonomi	Peningkatan pendapatan
	Peluang kerja
	Adanya kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Ketersediaan dan kebijakan pro bisnis untuk domain publik
Fasilitas	Fasilitas Pendidikan mengenai budaya masyarakat
	Fasilitas dan kemudahan akses pendidika
	Layanan Pendidikan yang baik
	Fasilitas kesehatan
Utilitas	Pelayanan medis
	Ruang terbuka di lingkungan tempat tinggal
	Lahan parkir
	Jaringan telekomunikasi maupun internet
Aksesibilitas	Pasokan air dan gas
	Pasokan energi listrik
	Kualitas air bersih
	Kualitas sanitasi
Transportasi	Jaringan jalan menuju desa
	Adanya layanan transportasi khusus
	Adanya batas kecepatan
	Moda transportasi
Fisik dan lingkungan sekitar permukiman	Ketersediaan halte/terminal
	Kondisi lingkungan fisik tempat tinggal
	Desain lingkungan
	Kebersihan lingkungan tempat tinggal
	Pencemaran lingkungan (polusi udara)
	Pemeliharaan lingkungan binaan
	Lanskap daerah pedesaan
	Ramah disabilitas dan lansia



Gambar 1. Ruang lingkup wilayah penelitian.

Nglanggeran tidak hanya berdampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negative yang ditimbulkan yaitu seperti kesulitan masyarakat desa dalam pengelolaan, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh wisatawan dan tingkat erosi Gunung Purba Nglanggeran, bising atau polusi suara, masyarakat terganggu,

hubungan masyarakat semakin longgar karena semakin kompleksnya aktifitas, lingkungan menjadi tidak terjaga dan juga vandalisme atau rusaknya asset budaya bebatuan Gunung Api Purba yang dilakukan oleh oknum wisatawan [6]. Pada bidang ekonomi pun tidak semua masyarakat merasakan peningkatan pendapatan. Untuk kelompok

Tabel 2.
Tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Nglanggeran tahun 2020

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK	Proporsi
Keluarga Prasejahtera	70	8%
Keluarga Sejahtera 1	255	30%
Keluarga Sejahtera 2	354	42%
Keluarga Sejahtera 3	128	15%
Keluarga Sejahtera 3 Plus	24	3%
Total	841 KK	

Tabel 3.
Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Desa Nglanggeran tahun 2020

Tenaga Kerja	Jumlah (jiwa)
Angkatan Kerja (Penduduk Usia 18-56 tahun)	1462
Penduduk usia 18-56 tahun masih sekolah dan tidak bekerja	46
Penduduk usia 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	124
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1052
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	146
Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	22
Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	29

Tabel 4.
Bobot kriteria dan sub-kriteria penilaian *livability* prioritas Desa Nglanggeran

Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Bobot
Keamanan Lingkungan	13%	Penjaga Keamanan	59%
		Kriminalitas	41%
		Kerukunan sosial antar warga	34%
Komunitas	9%	Kepedulian antar warga	31%
		Kenyamanan menjadi bagian dari komunitas	24%
		Perkumpulan/kegiatan warga	12%
Kenyamanan	14%	Kelayakhunian lingkungan	73%
		Kebisingan/polusi suara	27%
		Adanya kegiatan ekonomi	39%
Ekonomi	14%	Peningkatan pendapatan	34%
		Peluang kerja	27%
		Layanan Pendidikan yang baik	28%
Fasilitas	16%	Ketersediaan dan kemudahan akses sarana pendidikan	25%
		Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan	24%
		Ruang terbuka	14%
		Lahan parkir	9%
		Kualitas sanitasi	22%
		Kualitas air bersih	21%
Utilitas	18%	Pasokan energi listrik	22%
		Pasokan air dan gas	19%
		Jaringan telekomunikasi	16%
		Kondisi lingkungan fisik tempat tinggal	43%
Fisik dan lingkungan sekitar permukiman	16%	Pemeliharaan lingkungan binaan	30%
		Ramah disabilitas dan lansia	28%

masyarakat pedagang, kesenian dan juga *homestay* mengalami penurunan bahkan fluktuatif pendapatan karena jumlah pengunjung yang menurun beberapa tahun terakhir dan perubahan sistem tiket serta pembatasan tiket. Permasalahan-permasalahan yang muncul dan dampak positif yang dimiliki Desa Nglanggeran yaitu peningkatan ekonomi karena adanya intervensi dari kegiatan pariwisata membuktikan bahwa terjadi penurunan kelayakhunian desa. Oleh karena itu penelitian ini ingin merumuskan kriteria prioritas penilaian *livability* di Desa Nglanggeran sebagai desa wisata.

Livability adalah kondisi ideal dimana suatu permukiman atau kota mampu beradaptasi menciptakan kehidupan menyenangkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup. Secara eksplisit, *livability* mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan terdiri dari banyak karakteristik yang membuat lokasi dimana orang ingin hidup sekarang maupun di masa depan [4]. *Livability* sendiri sejatinya merupakan pendekatan yang dapat menilai

kondisi sosial masyarakat yang tidak hanya berfokus pada fisik namun lebih kepada manusia dan masyarakat. Menilai *livability* dalam konteks desa wisata tidak hanya dilakukan melalui peningkatan ekonomi masyarakat namun juga kesejahteraan sosial kehidupan masyarakat [7].

Sejauh ini belum ada penelitian yang fokus membahas tentang kelayakhidupan atau kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Nglanggeran. Untuk itu penelitian ini berusaha merumuskan kriteria prioritas penilaian *livability* di Desa Nglanggeran sebagai desa wisata menggunakan kriteria, sub kriteria dan parameter yang penting dan relevan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *mixed methods*. *Mixed method* yaitu menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif [8]. Dalam proses analisis penelitian ini, data-data deskriptif kualitatif akan

dikuantifikasi menjadi angka-angka ordinal yang kemudian akan dianalisis. Dalam proses penelitian ini data kualitatif berupa kriteria penilaian *livability* dikuantifikasi dan diidentifikasi oleh *stakeholder* untuk mendapatkan kriteria penilaian *livability* prioritas di Desa Nglanggeran.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah *stakeholder* yang terlibat dalam seluruh kegiatan Desa Nglanggeran seperti pemerintah, tokoh masyarakat dan juga perangkat desa. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* guna menunjuk *stakeholder* yang mengetahui kebijakan dan kondisi Desa Nglanggeran. *Stakeholder* pada penelitian ini dikelompokkan menjadi empat yaitu pertama pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dan Kelurahan Desa Nglanggeran (perangkat desa). Kedua yaitu tokoh/organisasi penting masyarakat melalui Karang Taruna. Ketiga yaitu akademisi dan keempat swasta melalui Pokdarwis dan Pelaku Wisata.

C. Variabel Penelitian

Dalam mengukur tingkat *livability* Desa Nglanggeran sebagai desa wisata, variabel penelitian yang digunakan berasal dari studi pustaka dari literatur-literatur terkait *livability* dan penilaian serupa yang memiliki parameter yang telah digunakan di beberapa negara. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah pada Tabel 1.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode primer dan sekunder. Metode primer yang dilakukan yaitu dengan observasi wilayah penelitian, menyebar kuesioner kepada *stakeholder* baik langsung maupun secara daring. Sedangkan metode sekunder dilakukan dengan mencari data-data dari instansi dan studi literatur terkait *livability*.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk mengidentifikasi kriteria penilaian *livability* prioritas Desa Nglanggeran berdasarkan *stakeholder*. Analisis ini dilakukan menggunakan variabel yang telah didapatkan dari kajian literatur dan dilakukan pembobotan pada masing-masing variabel untuk mendapatkan kriteria prioritas penilaian *livability*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Studi penelitian ini berlokasi di Desa Nglanggeran yang secara administrasi terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Nglanggeran merupakan desa wisata dengan luas wilayah ±762,8 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.708 jiwa. Wilayah penelitian mencakup seluruh Desa Nglanggeran yang terdiri dari 5 dusun, 5 RW dan 23 RT. Desa Nglanggeran didominasi oleh penggunaan lahan dengan fungsi tanah hutan seluas 268,25 Ha atau 35% dari luas total Desa Nglanggeran secara keseluruhan. Adapun *dependency ratio* Desa Nglanggeran yaitu 47% yang mana berarti 53%



Gambar 2. Gambaran umum obyek wisata.



Gambar 3. Model masalah hierarkis penilaian kriteria prioritas *livability* Desa Nglanggeran.

penduduk Desa Nglanggeran merupakan penduduk dalam usia produktif. Mayoritas masyarakat Desa Nglanggeran bermata pencaharian pada sektor pertanian yaitu sebanyak 1.414 jiwa atau 52% dari total penduduk Desa Nglanggeran (Gambar 1).

Berkembangnya Desa Nglanggeran menjadi desa wisata menciptakan lapangan atau peluang kerja yang baru seperti munculnya *homestay*, kelompok kuliner, *tour guide*, dan juga toko/warung kelontong di sekitar destinasi wisata. Dari segi keamanan pun, desa tetap tergolong aman karena tidak pernah terjadi tindak kejahatan atau kriminalitas di Desa Nglanggeran. Kelompok-kelompok masyarakat Desa Nglanggeran juga beragam dan aktif hingga saat ini. Mulai dari LPMD/LPMK, PKK, RW, RT, Karang Taruna, Kelompok Tani, Lembaga Adat, Organisasi Perempuan Lain, Kelompok Gotong Royong dan juga BUMDesa. Sedangkan kondisi kesejahteraan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa Nglanggeran pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Perkembangan pariwisata di desa juga perlu untuk melihat kondisi lingkungan Desa Nglanggeran meliputi kualitas air, kualitas udara, tingkat kebisingan serta sampah. Kualitas air di Desa Nglanggeran tergolong baik yaitu jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Sedangkan berdasarkan survey sekunder, kualitas udara di Desa Nglanggeran masih asri dan sejuk serta tidak mengandung zat/polutan berbahaya. 52% penggunaan lahan berupa hutan sedikit banyak mempengaruhi kualitas udara di desa yang masih asri dan sejuk. Selama kegiatan wisata di desa berlangsung tidak menimbulkan kebisingan atau polusi suara yang mengganggu masyarakat. Polusi suara di Desa Nglanggeran hanya berasal dari kendaraan bermotor, mobil dan alat pemotong kayu. Namun tingkat kebisingan di desa

tergolong ringan dan tidak memiliki dampak atau efek tertentu pada masyarakat. Kondisi persampahan di desa pun di kelola dengan baik oleh kelompok-kelompok masyarakat. Berdasarkan survey primer, di sepanjang jalan desa maupun objek-objek wisata tidak terlihat adanya penumpukan sampah. Desa Nglanggeran sendiri memiliki TPS mandiri dan juga terdapat kegiatan rutin pengangkutan sampah 2x seminggu dari rumah ke rumah. Meskipun tidak semua warga ikut dalam kegiatan ini karena keterbatasan biaya dan memilih untuk dibakar atau dijual ke tukang rongsok.

Desa Nglanggeran sendiri memiliki 10 objek wisata diantaranya yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran (a), Embung Nglanggeran (b), Air Terjun Kedung Kandang (c), Kampung Pitu, Tanaman/Pohon Termas, Arca Tanpa Kepala, Sumber Mata Air Comberan, Griya Batik, Griya Cokelat, dan Glamping View. Objek-objek wisata tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas wisata seperti tempat ibadah, tempat parkir, ruang terbuka publik seperti pendopo, air bersih, sanitasi, persampahan, layanan informasi, papan informasi, pos kesehatan, jaringan listrik, sarana telekomunikasi, dan transportasi wisata berupa jeep. Desa Nglanggeran juga memiliki beragam kegiatan yaitu *educational tourism, culture tourism, adventure tourism, dan agro tourism* (Gambar 2).

B. Mengidentifikasi Kriteria Penilaian Livability Prioritas di Desa Nglanggeran

Untuk mengidentifikasi kriteria penelitian *livability* prioritas di Desa Nglanggeran yaitu dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis variabel hasil kajian pustaka menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk mendapatkan kriteria prioritas dan penting serta relevan berdasarkan *stakeholder*. *Stakeholder* yang terlibat pada penelitian ini yaitu berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunung Kidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul, Kelurahan Desa Nglanggeran (Perangkat Desa), Karang Taruna, Akademisi, Pokdarwis, dan Pelaku Wisata (ojek, PKL, Parkir, dll).

Sebelum melakukan analisis *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu dan didapatkan 7 kriteria dan 24 sub-kriteria yang valid dan reliabel.

Adapun model masalah hierarkis penilaian kriteria prioritas *livability* Desa Nglanggeran dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil dari analisis AHP diperoleh bobot dari masing-masing kriteria dan sub kriteria.

Proses analisis AHP berupa kuesioner yang diisi secara langsung dan juga daring melalui *Google Forms* yang berisikan pertanyaan mengenai perbandingan berpasang-pasangan dari kriteria maupun sub-kriteria penelitian ini. Kemudian hasil dari pengisian kuesioner oleh stakeholder di *running* menggunakan *software* Expert Choice versi 11 untuk mendapatkan bobot masing-masing kriteria dan sub-kriteria. Dalam melakukan analisis AHP juga melihat rasio inkonsistensi pada hasil kuesioner. Rasio inkonsistensi yang masih dapat ditoleransi adalah kurang dari atau sama dengan 10% ($CR \leq 0,1$). Setelah diperoleh nilai kepentingan relatif (bobot) dari masing-masing stakeholder dan dipastikan semua jawaban telah memenuhi nilai rasio inkonsistensi $\leq 0,1$, bobot dari masing-masing stakeholder dikombinasi untuk memperoleh bobot keseluruhan. Adapun bobot

keseluruhan masing-masing kriteria dan sub-kriteria penilaian *livability* prioritas Desa Nglanggeran dapat dilihat pada Tabel 4.

Dapat dilihat pada Tabel 4, bahwa kriteria yang memiliki bobot tertinggi adalah utilitas yang menandakan bahwa utilitas merupakan kriteria prioritas penilaian *livability* Desa Nglanggeran. Sedangkan, kriteria dengan bobot terendah adalah komunitas yang menandakan bahwa kriteria komunitas bukan merupakan kriteria prioritas penilaian *livability* Desa Nglanggeran.

Kemudian, 3 sub-kriteria yang memiliki bobot paling tinggi ialah kelayakhunian lingkungan, kondisi lingkungan fisik tempat tinggal dan ketersediaan penjaga keamanan. Hal ini menandakan bahwa kenyamanan lingkungan hunian serta fisik dan lingkungan tempat tinggal maupun keamanan lingkungan merupakan kriteria paling penting atau prioritas untuk menciptakan lingkungan desa yang *livable*. Berdasarkan *stakeholder*, bahwa kenyamanan penghuni dan kondisi lingkungan permukiman serta keamanan lingkungan merupakan prioritas utama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan serta menimbulkan kepuasan penghuni dengan kondisi tempat tinggal yang dihuni. Sedangkan sub-kriteria dengan bobot terendah ialah ketersediaan perkumpulan/kegiatan warga dan ketersediaan lahan parkir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) Terdapat 7 kriteria dan 24 sub-kriteria dalam identifikasi penilaian *livability* prioritas Desa Nglanggeran beserta bobot pada masing-masing kriteria dan sub-kriteria yaitu: (a) Keamanan Lingkungan (13%) (Penjaga keamanan (59%), dan kriminalitas (41%)). (b) Komunitas (9%) (Kerukunan sosial antar warga (34%), kepedulian antar warga (31%), kenyamanan menjadi bagian dari komunitas (24%)). (c) Kenyamanan (14%) (Kelayakhunian lingkungan (73%) dan kebisingan/polusi suara (27%)). (d) Ekonomi (14%) (Adanya kegiatan ekonomi (39%), peningkatan pendapatan (34%), dan peluang kerja (27%)). (e) Fasilitas (16%) (Layanan pendidikan yang baik (28%), ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan (24%), ketersediaan dan kemudahan akses sarana pendidikan (25%), ruang terbuka (14%), dan lahan parkir (9%)). (f) Utilitas (18%) (Kondisi sanitasi (22%), kualitas air bersih (21%), pasokan energi listrik (22%), pasokan air dan gas (19%), jaringan telekomunikasi (16%)). (g) Fisik dan Lingkungan (18%) (Kondisi lingkungan fisik tempat tinggal (43%), pemeliharaan lingkungan binaan (30%), dan ramah lansia (28%)). (2) Kriteria dengan bobot tertinggi yaitu utilitas dan bobot terendah yaitu komunitas. Sedangkan, sub-kriteria dengan bobot tertinggi yaitu kelayakhunian lingkungan dan bobot terendah yaitu ketersediaan lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, "Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes)." Badan Pusat Statistik, Jakarta, p. 12, 2018, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>.
- [2] D. Wahyuni, "Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam perspektif partisipasi masyarakat," *J. Masal. Sos.*, vol.

- 10, no. 2, 2019.
- [3] Pemerintah Kabupaten Barito Utara, *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014-2025*, 1st ed. Kabupaten Barito Utara: Pemerintah Kabupaten Barito Utara, 2019.
- [4] R. Ayyubi, I. N. S. Wijaya, and W. D. Purnamasari, "Livability permukiman kampung Kota Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang," *J. Tata Kota dan Drh.*, vol. 9, no. 2, pp. 77–84, 2019.
- [5] R. Alsabila, "Pengaruh potensi wisata nglangeran terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa nglangeran kecamatan patuk kabupaten gunung kidul," *Maj. Pembelajaran Geogr.*, vol. 2, no. 1, pp. 84–91, 2019.
- [6] Y. A. Hilman and T. Kartika, "Dinamika kelembagaan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo," *Indones. J. Tour. Leis.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–37, 2020.
- [7] X. Wang, "The research on the evaluation index system of livable rural areas in China—by the case of rural areas in Henan Province," *Agric. Agric. Sci. Procedia*, vol. 1, pp. 456–461, 2010.
- [8] J. W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.